



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Investigasi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik:
Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP Di Kabupaten
Bandung Barat**

Skripsi

Oleh

Ali Akbar

6072001032

BANDUNG

2024



Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2023

**Investigasi Kecurangan pengadaan barang/jasa Publik:
Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP Di Kabupaten
Bandung Barat**

Skripsi

Oleh

Ali Akbar

6072001032

Pembimbing

Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD

BANDUNG

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Ali Akbar
Nomor Pokok : 6072001032
Judul : Investigasi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 1 Juli 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.


: 25.07.2024

Sekretaris

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.



: 25.07.2024

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.


: 25.07.2024

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Orpha Jane

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Akbar

NPM :6072001032

Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Investigasi Kecurangan Barang dan Jasa Publik: Studi Kasus
Pengadaan Perangkat IT Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP di
Kabupaten Bandung Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juni 2024



ABSTRAK

Nama : Ali Akbar

NPM : 6072001032

Judul : Investigasi Kecurangan pengadaan barang/jasa Publik: Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP Di Kabupaten Bandung Barat

Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia sangat rentan terhadap praktik kecurangan atau *fraud*. Salah satu pengadaan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kecurangan adalah paket pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh untuk jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan potensi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa publik dengan metode investigasi kecurangan.

Landasan teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Investigasi Paket pengadaan barang/jasa dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam menggunakan alur investigasi paket pengadaan barang/jasa, dimensi yang digunakan yaitu: (1) Identifikasi Paket Pengadaan, (2) Identifikasi Perencanaan, (3) Identifikasi Pengadaan Sejenis, (4) Identifikasi Rekam Jejak Perusahaan, (5) Identifikasi Hasil Pekerjaan, (6) Analisis. Penelitian ini berfokus pada kecurangan paket pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi seperti Opentender.net, LPSE, siki.pu.go.id, ahu.go.id, sikap.lkpp.go.id dan sirup.lkpp.go.id.

Penelitian ini menemukan potensi kecurangan dalam paket pengadaan barang/jasa publik dapat dibuktikan dengan Metode Investigasi Kecurangan. Skor PFA (Potential Fraud Analysis) dalam Opentender dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan investigasi kecurangan pada suatu paket pengadaan barang/jasa publik. Dari investigasi ini didapatkan indikasi kuat terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat. Indikasi tersebut diantaranya adalah praktik monopoli dan kartel, dan kerjasama atau persekongkolan antara penyedia dan instansi pemerintah.

Kata Kunci : **Investigasi, Kecurangan, Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Publik, Tender**

ABSTRACT

Name : *Ali Akbar*

NPM : *6072001069*

Title : *Investigation of Fraud in Public Procurement: A Case Study of IT Equipment Procurement for Remote Learning Support in Junior High Schools in West Bandung Regency*

The procurement of public goods and services in Indonesia is highly susceptible to fraudulent practices. One area with a high potential for fraud is the procurement of IT equipment packages to support distance learning activities (KBM) for junior high schools in West Bandung Regency. Therefore, this study aims to demonstrate the potential for fraud in public goods and services procurement using fraud investigation methods.

The theoretical framework used in this research is the Procurement Package Investigation Method from Indonesia Corruption Watch (ICW). In utilizing the procurement package investigation flow, the dimensions used are: (1) Identification of Procurement Packages, (2) Identification of Planning, (3) Identification of Similar Procurements, (4) Identification of Company Track Records, (5) Identification of Work Results, and (6) Analysis. This research focuses on the fraudulent procurement of IT equipment packages to support distance learning activities for junior high schools in West Bandung Regency. The study uses a qualitative approach with interview and literature study methods. The data used are secondary data obtained from official websites such as Opentender.net, LPSE, siki.pu.go.id, ahu.go.id, sikap.lkpp.go.id, and sirup.lkpp.go.id.

This research found that the potential for fraud in public goods/services procurement packages can be proven using the Fraud Investigation Method. The PFA (Potential Fraud Analysis) score in Opentender can be used as a basis for conducting fraud investigations in a public goods/services procurement package. This investigation found strong indications of fraud in the process of procuring IT equipment to support distance teaching and learning activities for junior high schools in West Bandung Regency. These indications include monopolistic and cartel practices, and cooperation or conspiracy between providers and government agencies.

Keywords : *Investigation, Fraud, Goods/Services Procurement, Public Procurement, Tender*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Rumusan Penelitian	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Pengadaan Barang/Jasa Publik	14
2.1.1. Kecurangan pengadaan barang/jasa Publik	16
2.2. Metode Investigasi Kecurangan Paket pengadaan barang/jasa Publik	17
2.4. Model Penelitian	19
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.3. Objek Penelitian	24
3.4. Sumber Data	25
3.4.1. Data Primer	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data	26
3.5.1. Wawancara	26
3.5.2. Studi Dokumen	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6.1. Kodifikasi Data	28
3.6.2. Penyajian Data	28
3.6.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	29
3.7. Keabsahan Data	29
3.8. Tahapan Pengumpulan Data	30

BAB IV	32
TEMUAN.....	32
4.1. Investigasi Kecurangan Paket pengadaan barang/jasa Publik.....	34
4.1.1 Identifikasi Paket Pengadaan	34
4.1.2 Identifikasi Perencanaan.....	36
4.1.3 Identifikasi Pengadaan Sejenis	39
4.1.4 Identifikasi Rekam Jejak Perusahaan.....	45
4.1.5 Identifikasi Hasil Pekerjaan	64
BAB V	72
ANALISIS.....	72
5.1 Analisis Kepatuhan	72
5.2 Analisis Hasil Pekerjaan.....	75
5.3 Analisis Hukum	81
BAB VI	86
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	86
6.1. Kesimpulan Penelitian.....	86
6.2. Rekomendasi Penelitian	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91
SURAT IZIN PENELITIAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya	9
Tabel 2. 1 Lokasi Investigasi Lapangan	24
Tabel 2. 2 Data Informan	26
Tabel 3. 1 Tahapan Pengumpulan Data	30
Tabel 4. 1 Informasi dan Dokumentasi Lapangan	64
Tabel 5. 1 Proses Tender	75
Tabel 5. 2 Item dalam Paket Pengadaan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data OpenTender LPSE.....	6
Gambar 1. 2 Network Visualization.....	8
Gambar 1. 3 Density Visualization.....	8
Gambar 2. 1 Alur Investigasi Kecurangan Paket PBJ (Indonesia Corruption Watch, 2021)	22
Gambar 4. 1 Data OpenTender LPSE Kabupaten Bandung Barat tahun 2020	33
Gambar 4. 2 Indikator dan Informasi Tender (Opentender.net)	35
Gambar 4. 3 RUP Penyedia (lkpp.go.id)	37
Gambar 4. 4 RUP Penyedia (lkpp.go.id)	37
Gambar 4. 5 Perencanaan (Opentender.net)	38
Gambar 4. 6 Indikator dan Informasi Tender untuk jenjang SD (Opentender.net).....	40
Gambar 4. 7 Indikator dan Informasi Tender untuk jenjang SMP (Opentender.net).....	40
Gambar 4. 8 Informasi Tender untuk jenjang SD (lpse.bandungbaratkab.go.id)	41
Gambar 4. 9 Informasi Tender untuk jenjang SMP (lpse.bandungbaratkab.go.id)	41
Gambar 4. 10 Informasi Tender Perangkat IT Kab. Pangandaran (Opentender.net).....	42
Gambar 4. 11 Informasi Tender Perangkat IT Kota Bandung (Opentender.net)	43
Gambar 4. 12 Informasi Tender Perangkat IT Kota Bandung (lpse.bandung.go.id).....	44
Gambar 4. 13 Informasi Tender (lpse.bandungbaratkab.go.id).....	46
Gambar 4. 14 Informasi Tender (lpse.bandungbaratkab.go.id).....	47
Gambar 4. 15 Informasi Tender (lpse.bandungbaratkab.go.id).....	47
Gambar 4. 16 Daftar Hitam PT Citra Bahana Medika (inaproc.id/daftar-hitam)	48
Gambar 4. 17 Daftar Hitam PT Citra Bahana Medika (inaproc.id/daftar-hitam)	49
Gambar 4. 18 Daftar Hitam PT Widuri Abdi Jaya (inaproc.id/daftar-hitam)	50
Gambar 4. 19 Widuri Abdi Jaya (sikap.lkpp.go.id/pelaku-usaha)	51
Gambar 4. 20 Widuri Abdi Jaya (sikap.lkpp.go.id/pelaku-usaha)	51
Gambar 4. 21 Citra Bahana Medika (sikap.lkpp.go.id/pelaku-usaha).....	51
Gambar 4. 22 Citra Bahana Medika (sikap.lkpp.go.id/pelaku-usaha).....	52
Gambar 4. 23 Kriteria Kualifikasi (sikap.lkpp.go.id/shortlist)	54
Gambar 4. 24 Informasi Penyedia: Citra Bahana Medika (opentender.net).....	55
Gambar 4. 25 Informasi Penyedia: Citra Bahana Medika (opentender.net).....	55
Gambar 4. 26 Daftar Perusahaan Salmi Ardian (opentender.net)	56
Gambar 4. 27 Daftar Perusahaan M. Nurdin Lidan (opentender.net).....	56
Gambar 4. 28 Daftar Perusahaan Jaja Sadija (opentender.net).....	56
Gambar 4. 29 Daftar Perusahaan Wizar Putra Ilhami (opentender.net).....	57
Gambar 4. 30 Daftar Perusahaan Zulkifli (opentender.net)	57
Gambar 4. 31 Blacklist Citra Bahana Medika (opentender.net)	58
Gambar 4. 32 Profil Citra Bahana Medika (indokontraktor.com)	59
Gambar 4. 33 Profil Citra Bahana Medika (indokontraktor.com)	59
Gambar 4. 34 Profil Citra Bahana Medika (indokontraktor.com)	59
Gambar 4. 35 Alamat Widuri Abdi Jaya (Google Maps)	61
Gambar 4. 36 Alamat Widuri Abdi Jaya (Google Maps)	61
Gambar 4. 37 Alamat Widuri Abdi Jaya (Google Maps)	62
Gambar 4. 38 Alamat Citra Bahana Medika (Google Maps).....	63
Gambar 4. 39 Citra Satelit Citra Bahana Medika (Google Maps)	63

Gambar 5. 1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	73
Gambar 5. 2 Temuan LHP BPK.....	74
Gambar 5. 3 Temuan LHP BPK.....	74
Gambar 5. 4 Berita Acara Serah Terima untuk SMPN 3 Padalarang.....	77
Gambar 5. 5 Berita Acara Serah Terima untuk SMPN 1 Lembang.....	77

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi I yang berjudul “Investigasi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP Di Kabupaten Bandung Barat”. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka sebagai tugas akhir dari segala proses pendidikan yang peneliti tempuh di Universitas Katolik Parahyangan, hingga nantinya mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik.

Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian proposal ini, tentunya tidak terlepas dari segala bantuan, dukungan, serta doa dari pihak-pihak lain di lingkungan sekitar peneliti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yaitu:

1. Allah SWT, atas segala nikmat Kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan tauladan serta ajaran- ajaran yang menjadi pedoman dalam setiap langkah peneliti.
2. Kedua orang tua peneliti yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang membesarkan peneliti tanpa henti memberikan doa, dukungan serta motivasi. Terimakasih yang sebesar – besarnya atas setiap usaha dan pengorbanan untuk membesarkan peneliti hingga saat ini. Serta adik yang sangat peneliti sayangi selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi hidup peneliti.

3. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor beserta segenap jajaran Rektorat yang telah memimpin dan bertugas di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Tutik Rachmawati, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen wali sekaligus idola peneliti yang senantiasa membimbing, menginspirasi, memotivasi dan membuat peneliti semakin pintar pada setiap pertemuan. Terimakasih atas kesempatan, kepercayaan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti. Terimakasih atas waktu, tenaga serta dedikasi yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini.
5. Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan segenap dosen Universitas Katolik Parahyangan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Indonesia Corruption Watch (ICW) khususnya Wana Alamsyah dan Kes Tutoroong selaku Divisi Pengelolaan Pengetahuan yang telah membimbing peneliti dalam melakukan investigasi.
7. Ulivia Vinazah selaku mentor sekaligus teman terbaik yang selalu ada di setiap situasi dan senantiasa membantu, membimbing dan memotivasi penulis sepenuh hati selama perkuliahan. Terimakasih untuk seluruh waktu dan tenaga yang diberikan sehingga peneliti dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teman-teman terdekat peneliti yang selalu ada dan senantiasa memberi ilmu, motivasi, dukungan, inspirasi, serta bantuan: Hendryan Pratama, Rizki

Varilandi, Rizky Ramadhan, Dimas Indra, Rizqal Firdaus, Bagus Rohmatun, Abhirama, Keith Uno, Raihan Fachrezy, Azka Nuha, Samuel R Wakum, Hanif Ramadhansyah, Daffa Algani, Lukman Firmansyah, Rizky Buyung, Jonathan Putra, Christo Ariel, Jason Harun, Reyhan Muhammad, Heri Septian, Muhamad Ibnu, Muhammad Jourdan, Fawwaz Pradipta, Randy Claudio, Adinandra, Zakky Zainal, dan Alfiantra.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi publik di Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma dari masa ke masa. Pada awalnya, sistem administrasi publik bersifat sentralistik dan birokratis di bawah rezim Orde Baru yang otoriter (Sedarmayanti, 2009). Setelah era reformasi 1998, paradigma administrasi publik bergeser ke arah New Public Management yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Kemudian muncul paradigma baru *e-governance*, di mana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara online kepada masyarakat (Sadar, 2023). Perkembangan paradigma administrasi publik ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Reformasi 1998 telah mendorong perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah munculnya konsep *public entrepreneurship* dalam penyediaan layanan publik (Osborne & Gaebler, 1992). *Public entrepreneurship* merupakan skema pelibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan layanan publik melalui kerja sama dengan pemerintah atau istilah *public private partnership (PPP)* (Lukman, 2007). Penerapan konsep ini dimaksudkan untuk menutupi keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan masyarakat (Prasetyantoko, 2008). *Public entrepreneurship* diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Salah satu layanan publik yang kerap melibatkan sektor swasta melalui skema PPP dan *public entrepreneurship* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah (Sjahrir et al., 2014). Pengadaan barang/jasa sangat dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi

berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). Sayangnya, pengadaan barang/jasa pemerintah sangat rawan terhadap praktik kecurangan atau *fraud* (Surianta & Eryanto, 2020). Diketahui bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia rawan terhadap praktik kecurangan dan penyimpangan. Sepanjang tahun 2004 hingga 2019, terdapat 115 kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,8 triliun. Berbagai bentuk kecurangan yang kerap terjadi antara lain penyuapan, *mark up* harga secara fiktif, korupsi dana pengadaan, hingga kolusi antar rekanan. Tindakan kecurangan ini jelas sangat merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik yang seharusnya diterima masyarakat.

Oleh karena itu, pencegahan dan investigasi kecurangan menjadi krusial untuk dilakukan, guna mencegah kerugian negara yang lebih besar. Berbagai modus kecurangan yang kerap muncul dalam pengadaan barang/jasa antara lain *mark up* harga secara fiktif, penyuapan oknum pegawai, korupsi dana pengadaan, kolusi antar rekanan, hingga penipuan dalam proses pengadaan (Zainal et al., 2020). Tindakan kecurangan sangat merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik kepada masyarakat (Sjahrir et al., 2014). *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa telah menjadi masalah genting yang harus ditangani pemerintah (Kristiansen et al., 2008). Menyadari dampak buruk kecurangan pengadaan barang/jasa, maka investigasi kecurangan perlu dilakukan dengan memanfaatkan *Information Technology* atau yang selanjutnya disingkat IT agar lebih efektif dan akuntabel (Sjahrir et al., 2014). Pemanfaatan IT ini sejalan dengan paradigma e-governance untuk reformasi birokrasi saat ini (Indrajit, 2020). Dengan investigasi kecurangan yang optimal berbasis IT, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan juga semakin baik dalam melayani kepentingan publik (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, pemanfaatan IT untuk investigasi kecurangan di Indonesia masih sangat terbatas saat ini.

Korupsi di sektor pendidikan tidak dapat ditolerir karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan menghalangi terpenuhinya hak tersebut. Dampak korupsi dalam pengadaan pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat proses belajar mengajar, mengurangi kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk memahami mengapa korupsi di sektor pendidikan perlu diteliti. Korupsi dalam sektor ini berpotensi merusak fondasi pendidikan dan masa depan generasi muda. Penelitian mengenai korupsi di sektor pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik-praktik korupsi terjadi, dampaknya terhadap kualitas pendidikan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut secara efektif. Korupsi dalam pengadaan perangkat IT untuk pendidikan jarak jauh, misalnya, bisa mengakibatkan siswa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk belajar, sehingga menurunkan mutu pendidikan yang mereka terima. Dengan memahami dan meneliti korupsi di bidang pendidikan, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan strategi pemberantasan yang lebih efektif, demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Korupsi di sektor pendidikan tidak dapat ditolerir karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan menghalangi terpenuhinya hak tersebut. Dampak korupsi dalam pengadaan pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat proses belajar mengajar, mengurangi kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan

ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2018). Pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang tepat di sektor pendidikan juga akan menghambat perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk memahami mengapa kecurangan pengadaan publik di sektor pendidikan perlu diteliti. Kecurangan dalam sektor ini berpotensi merusak fondasi pendidikan dan masa depan generasi muda. Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi kecurangan dalam pengadaan publik di sektor pendidikan yang akan berdampak buruk khususnya bagi para siswa serta tenaga pendidik. Korupsi dalam pengadaan pendidikan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menghambat proses belajar mengajar, mengurangi kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memahami dan meneliti korupsi di bidang pendidikan, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan strategi pemberantasan yang lebih efektif, demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Berdasarkan studi terdahulu, pemanfaatan teknologi informasi dalam investigasi kecurangan pengadaan barang/jasa di Indonesia masih sangat minim (Ariesta & Safitri, 2019). Padahal teknologi informasi terbukti mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan manual (Abbasi et al., 2012). Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia lebih gencar mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas investigasi terhadap kecurangan dalam pengadaan barang/jasa sektor publik. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan *Opentender.net*, yakni sebuah platform pemantauan *e-procurement* berbasis daring yang dikembangkan sejak 2013 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tujuan menyajikan data pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP serta potensi resiko kecurangannya. Dengan demikian, *OpenTender* dapat menjadi solusi investigasi

kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien di era digital. Upaya ini penting dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan publik. Investigasi *fraud* berbasis IT dapat menjadi *game changer* dalam upaya pemberantasan fraud di era digital saat ini.

Terdapat potensi kecurangan yang tinggi pada pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh untuk jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pengadaan perangkat IT seperti laptop, tablet, dan modem internet ini dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 (Herliandry et al., 2020). Namun, pengadaan jenis ini rawan praktik korupsi karena nilai kontrak yang besar dan minimnya pengawasan (Fadillah et al., 2021). Oleh karena itu, potensi adanya kecurangan dalam pengadaan ini patut mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Termasuk pengadaan perangkat IT penunjang KBM jarak jauh di KBB ini. Potensi kecurangan tinggi tersebut dapat dilihat dari beberapa bukti berikut.

Terdapat potensi kecurangan yang tinggi pada pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh untuk jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pengadaan perangkat IT seperti laptop, tablet, dan modem internet ini dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 (Herliandry et al., 2020). Namun, pengadaan jenis ini rawan praktik korupsi karena nilai kontrak yang besar dan minimnya pengawasan (Fadillah et al., 2021). Potensi kecurangan tinggi tersebut dapat dilihat dari beberapa bukti berikut.

Pertama, data OpenTender menunjukkan skor *Potential Fraud Analysis (PFA)* sebesar 79 untuk pengadaan perangkat IT penunjang KBM jarak jauh di 19 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 (Opentender.net, 2020). Angka ini merupakan skor tertinggi sekaligus menduduki peringkat pertama dan kedua

sebagai pengadaan paling berpotensi fraud di KBB pada tahun tersebut. Tingginya skor PFA mengindikasikan potensi kecurangan yang perlu diwaspadai dalam proses pengadaan perangkat IT ini.

Data Tender

Skor	Judul	Penyedia	LPSE	Tanggal Pengumuman	Nilai Kontrak
79	Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh untuk Jenjang SD	PT. CITRA BAHANA MEDIKA 	LPSE Kabupaten Bandung Barat	30 November 2020	Rp 12.008.634.000,00
79	Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh untuk Jenjang SMP	PT. CITRA BAHANA MEDIKA 	LPSE Kabupaten Bandung Barat	30 November 2020	Rp 7.080.730.000,00
75	Sanitarian Kit	PT. DIVA MULYA PRATAMA	LPSE Kabupaten Bandung Barat	23 November 2020	Rp 900.777.768,00
75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Monitoring & Broadcast Pembelajaran Melalui Video Conference Di Dinas Pendidikan	CV.SUMBER ABADI	LPSE Kabupaten Bandung Barat	30 November 2020	Rp 2.458.658.615,28
71	Pengadaan Ternak Domba Wilayah III	CV. RED JAYA UTAMA	LPSE Kabupaten Bandung Barat	24 November 2020	Rp 355.914.353,02

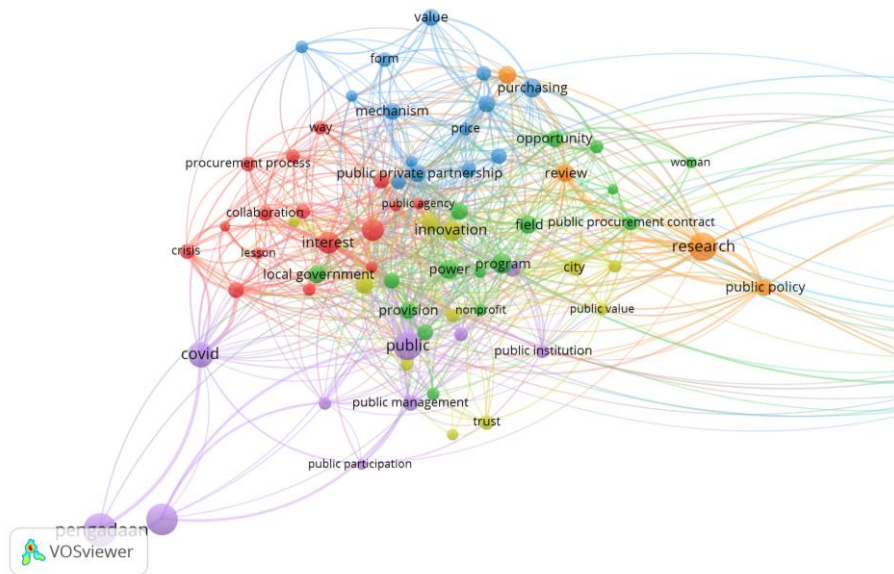
Gambar 1. 1 Data OpenTender LPSE

Kedua, terdapat dugaan adanya praktik monopoli dan kartel yang ditandai dengan beberapa hal, seperti praktik monopoli dan kartel antar rekanan dalam pengadaan 3 item perangkat IT penunjang KBM jarak jauh (TMI, 2021). Terdapat indikasi bahwa pihak yang mengikuti lelang diduga bekerjasama dengan Instansi Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pihak menduga adanya kesengajaan membuat sistem Metode “Tender Cepat” guna menghindari peserta lelang yang tidak diharapkan untuk menang. Indikasi ini juga didukung dengan hasil tender beberapa paket pengadaan yang dimenangkan oleh rekanan yang sama, yaitu PT Widuri Abdi Jaya senilai Rp12,12 miliar untuk perangkat IT jenjang SD, PT Widuri Abdi senilai Rp7,12 miliar untuk jenjang SMP, dan PT Cipta Megah Kencana senilai Rp2,46 miliar untuk sarana monitoring pembelajaran daring dinas pendidikan. Total nilai ketiga paket tender tersebut mencapai Rp21,8 miliar dari APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Pola tender yang mengarah pada rekanan tertentu ini mengindikasikan potensi kolusi dan korupsi dalam proses pengadaan barang publik tersebut. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh

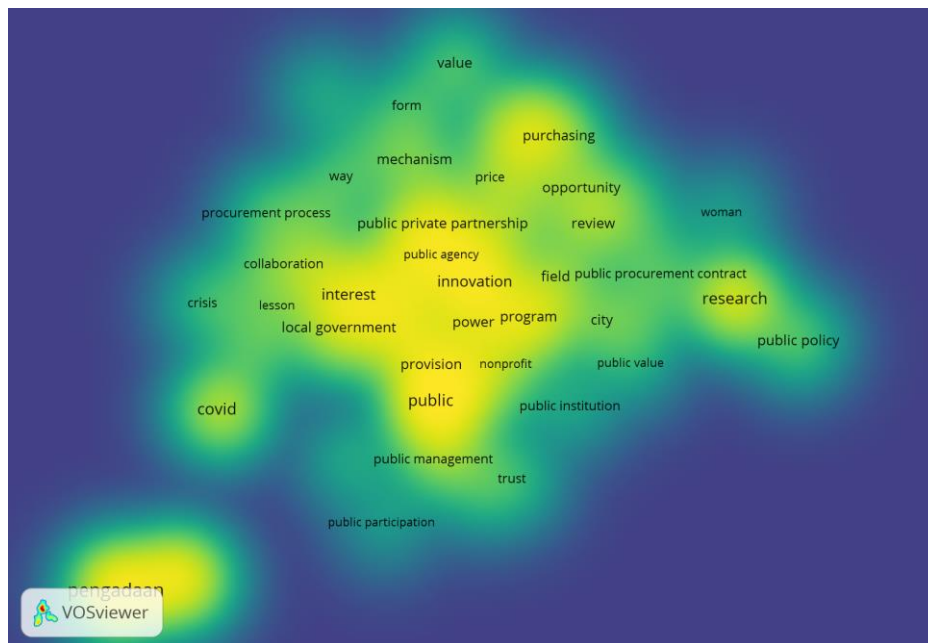
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dengan memberikan surat konfirmasi pada 25 Mei 2021. Melalui Surat Jawaban Konfirmasi No 027/Disdik/2021, Kepala Dinas Pendidikan KBB menyampaikan tiga hal. Pertama, digunakan tender cepat dalam pengadaan barang/jasa ini dikarenakan waktu yang terbatas untuk penyerapan anggaran dan tender cepat. Kedua, pemenang lelang cepat telah memenuhi syarat yang ditentukan di dalam KAK/dokumen Lelang. Ketiga, alat yang diterima oleh sekolah penerima bantuan adalah Peralatan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Sesuai dengan informasi yang diterima redaksi TJI, menyebutkan adanya dugaan praktik monopoli dan kartel dalam kegiatan pengadaan item.

Belum banyak penelitian yang menyoroti permasalahan kecurangan dalam pengadaan publik. Sebagaimana diuraikan di atas mengenai deteksi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa penting dilakukan mengingat tingginya potensi kecurangan yang kerap terjadi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu layanan publik yang rawan sekali terjadinya praktik kecurangan atau kecurangan. Berbagai kasus korupsi dana, *mark up* harga fiktif, hingga kolusi antar rekanan terus terjadi dalam proses pengadaan pemerintah. Maka dari itu analisis bibliometrik dilakukan dengan tujuan mengetahui serta menganalisis perkembangan publikasi tentang kecurangan atau fraud dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa jurnal menggunakan Publish or Perish yang terintegrasi dengan Google Scholar. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian menggunakan kata kunci "*Public Procurement*" dan "Pengadaan Publik". Didapatkan sebanyak 1.337 jurnal yang membahas topik pengadaan publik dan selanjutnya dianalisis melalui VOSviewer untuk mengetahui seberapa sering topik tertentu muncul dalam publikasi administrasi publik. *Network visualization* akan menunjukkan hubungan antar topik melalui garis benang dan *density visualization* yang akan menggambarkan kata kunci apa saja yang sering muncul atau

sering dibahas dalam publikasi jurnal dengan menggunakan saturasi warna, yang mana jika semakin terang warnanya maka semakin sering pula kata kunci tersebut muncul.



Gambar 1. 2 Network Visualization



Gambar 1. 3 Density Visualization

Gambar visualisasi diatas menunjukkan bahwa beberapa kata kunci seperti Public Private Partnership (PPP) dan Innovation menjadi topik yang paling banyak muncul. Namun sebaliknya, kata kunci “*fraud*” atau “kecurangan” masih belum dibahas dalam publikasi Administrasi Publik mengenai pengadaan publik karena kedua kata tersebut tidak

terdapat dalam visualisasi diatas. Sehingga, hasil analisis bibliometrik ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kecurangan dalam pengadaan barang publik.

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Metode	Data	Hasil
1.	Devi Safitri (2022)	Analisis Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kota Depok	Metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumen	Data primer wawancara mendalam dengan 8 pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok serta data sekunder berupa dokumen pengadaan barang/jasa.	Pengendalian intern dinilai belum efektif mencegah potensi kecurangan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kota Depok sehingga perlu perbaikan sistem pengendalian intern.
2.	Rama Dinata (2020)	Penerapan Prinsip Transparansi dalam Upaya Minimasi Fraud	Wawancara mendalam 12 informan dari internal Dinkes dan	Penerapan transparansi pengadaan dinilai masih lemah	Penerapan transparansi pengadaan dinilai masih lemah sehingga

		<p>pengadaan barang/jasa Pemerintah Metode: Metode kualitatif studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.</p>	<p>rekanan pengadaan barang/jasa.</p>	<p>sehingga rawan fraud, perlu perbaikan tata kelola data dan akses informasi oleh publik.</p>	<p>rawan fraud, perlu perbaikan tata kelola data dan akses informasi oleh publik.</p>
3.	Tiara Agnes (2021)	<p>Analisis Risiko Kecurangan pengadaan barang/jasa menggunakan Fraud Risk Assessment</p>	<p>Metode campuran (mixed methods) kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>Data kuesioner, wawancara, dan studi dokumen terkait pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Dihasilkan pemetaan risiko-risiko kecurangan pengadaan barang/jasa beserta rekomendasi mitigasinya.</p>

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi terkait kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Dalam beberapa tahun sebelumnya, masih banyak terdapat kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, walaupun sudah dikeluarkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa namun masih banyak emiten yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul **“Investigasi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Studi Kasus Pengadaan Perangkat IT Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jarak Jauh Untuk SMP Di Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan maraknya kasus kecurangan pengadaan barang/jasa di Indonesia meskipun telah dibuat peraturan dan pengawasan dari pemerintah, maka peran masyarakat untuk melakukan monitoring dan investigasi kecurangan menjadi penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah investigasi kecurangan dengan memanfaatkan skor Potential Fraud Analysis serta teknologi informasi guna mendeteksi dan mengungkap kecurangan.

Investigasi kecurangan di Indonesia umumnya dilakukan melalui metode audit, baik secara internal oleh lembaga terkait maupun eksternal yang dilakukan oleh auditor independen atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, investigasi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Namun, metode ini umumnya tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya, sehingga pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas korupsi menjadi terbatas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah berupaya memfasilitasi masyarakat dengan Opentender, sebuah platform yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan monitoring dan menampilkan potensi kecurangan dari setiap paket pengadaan pemerintah. Platform ini menyajikan data yang memungkinkan masyarakat, khususnya jurnalis dan peneliti, untuk memantau proses pengadaan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, ICW telah merancang metode investigasi kecurangan pengadaan

pemerintah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mendeteksi dan mengungkap kecurangan.

Penelitian ini akan menguji potensi kecurangan dengan menggunakan metode investigasi kecurangan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh ICW. Metode ini menggabungkan teknik-teknik dari Open Source Intelligence (OSINT) untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia secara publik. Dengan menggunakan teknologi informasi, metode ini memungkinkan identifikasi kecurangan secara lebih efisien dan efektif, khususnya dalam sektor pendidikan. Penggunaan teknik investigasi kecurangan PBJ tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi investigasi, tetapi juga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, metode ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pola dan indikasi kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode audit konvensional, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga integritas pengadaan publik.

1.3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka didapatkan rumusan penelitian **Apakah potensi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa publik dapat dieksplorasi dengan metode investigasi kecurangan?**

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan potensi kecurangan dalam pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan metode investigasi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami cara-cara

melakukan investigasi dan mendeteksi kecurangan serta memberikan bukti empiris terkait kecurangan yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai metode investigasi kecurangan pengadaan barang/jasa, khususnya pada paket pengadaan perangkat IT penunjang KBM jarak jauh. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan investigasi kecurangan pada paket pengadaan barang/jasa publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta menjadi referensi bagi instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kecurangan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga berkontribusi nyata dalam perbaikan sistem pengadaan barang/jasa publik di Indonesia.